

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM



**LAPORAN KINERJA (L K J)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2023**

Kata Pengantar

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disampaikan.

Laporan Kinerja (LKJ) Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim kami sajikan dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden dimaksud. Laporan ini memuat informasi tentang keberhasilan dan kegagalan kinerja serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang sangat berarti sehingga terselesaikannya laporan ini.

Akhirnya kami harapkan kritik dan saran membangun dari pembaca untuk penyempurnaan LKJ ini, kiranya dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim tahun berikutnya, sekaligus mendorong percepatan terwujudnya **Good Governance** di Kabupaten Muara Enim.

Muara Enim, Januari 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUARA ENIM**



**Drs. ANDY WIJAYA, MM
PEMBAH UTAMA MUDA (IV/c)
NIP 196609251986081001**

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim tahun 2023 ini merupakan implementasi pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra) tahun keempat, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim tahun 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan guna mewujudkan visi organisasi **“Kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat Negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, dinamis, tentram dan damai, serta sejahtera lahir dan bathin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.**

Pada tahun 2023 guna mencapai sasaran, kebijakan, program dan kegiatan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim didukung anggaran sebesar Rp.11.341.202.315,- melalui APBD Kabupaten Muara Enim yang tercermin pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.53.963.129.595,- atau 98.20%, sedangkan kinerja yang dapat mencapai sasaran dari indikator kinerja sebagai berikut :

- Sasaran, yaitu meningkatnya rasa aman, demokratis dan partisipatif masyarakat kabupaten Muara Enim dengan indikator kinerja yaitu zero konflik SARA dan sosial yang telah mencapai kinerja sebesar 100%.

Muara Enim, Januari 2024

**KEPALA BADAN KESATAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUARA ENIM**



**Drs. ANDY WIJAYA, MM
PEMBAINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP 196609251986081001**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DATA UMUM DAN ORGANISASI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Tekhnis Daerah, Peraturan Bupati Muara Enim No 11 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam Peraturan tersebut, tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peratrrran Pemndang-undangan
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kenrkunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,

pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan ;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;

- e. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

2. BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi sbb :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

3. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang pendidikan

politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik. Dalam menyelenggarakan tugas bidang politik dalam negeri mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi

4. BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. Dalam

menyelenggarakan tugas bidang Ketahanan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas di wilayah kabupaten;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas di wilayah kabupaten;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas di wilayah kabupaten;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas di wilayah kabupaten;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas di wilayah kabupaten;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

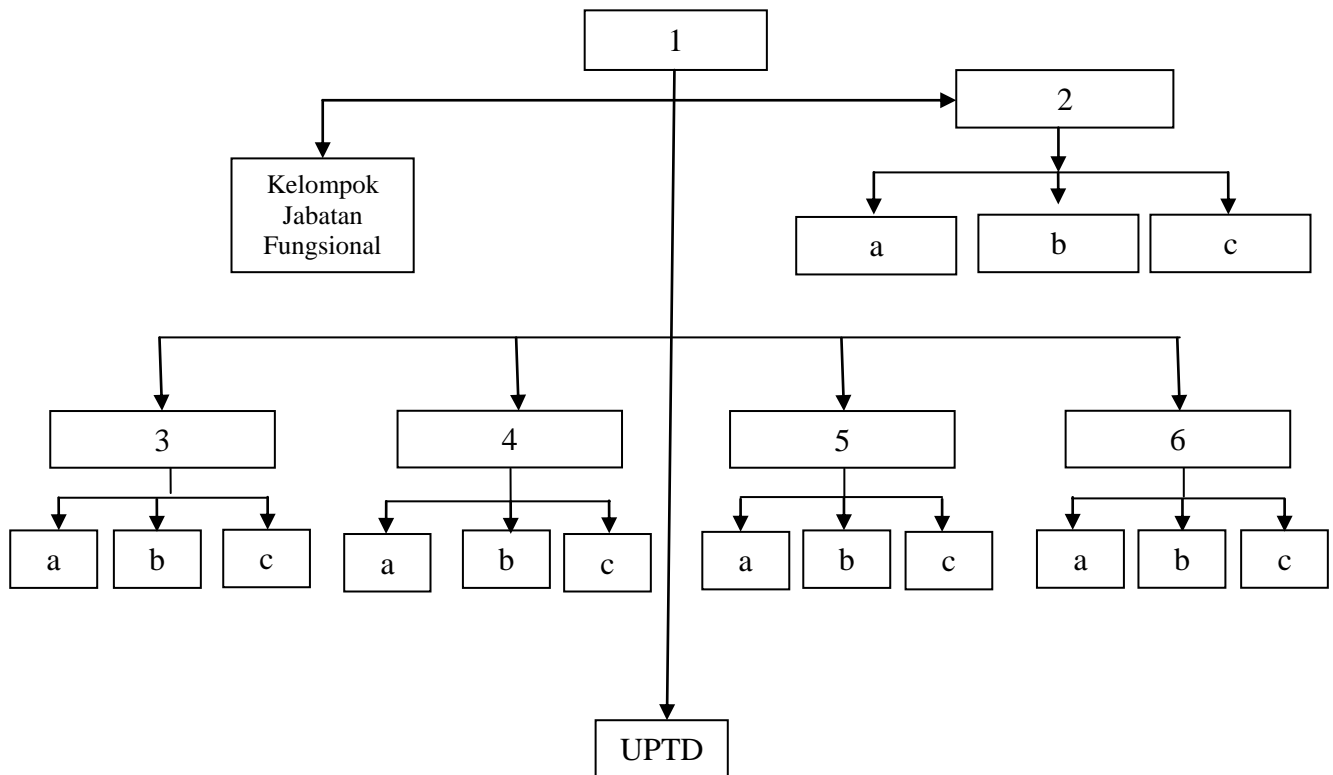
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- f. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim dipimpin oleh seorang Kepala, dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung dengan stuktur organisasi sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan
 - a. Kepala Sub Bagian Umum
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter bangsa
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
 - a. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama
 - b. Sub Bidang Organisasi Masyarakat
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini adalah untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang perbaikan pedoman penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tujuannya adalah :

1. Sebagai Implementasi dari pelaksanaan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran, sebagaimana yang di harapkan dalam Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Sebagai bentuk laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program kegiatan yang meliputi keberhasilan, kekurangan, evaluasi dan langkah- langkah sebagai upaya peningkatan kinerja untuk tahun anggaran 2023.

1.3 SISTEMATIKA LKJ 2023

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKJ) Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 pada Bab IV tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan,

Menjelaskan mengenai gambaran umum organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKJ) tahun 2023.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2018-2023 dan penetapan kinerja tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan menguraikan analisis pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyangkut sasaran kinerja dan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran tahun 2023.

BAB IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan atas laporan kinerja dan saran- saran dalam pelaksanaan kerja untuk tahun anggaran 2023.

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan stratejik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi secara internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting untuk dapat memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (threats) karena analisis tersebut merupakan perwujudan dari visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat maka dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala bagi instansi pemerintah.

2.1 Rencana Stratejik (Renstra)

2.1.1 Pernyataan Visi

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga harus disesuaikan dengan perubahan tersebut. Adapun Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim adalah serbagai berikut :

“ KOKOHNYA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SEBAGAI PEREKAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG DEMOKRATIS, DINAMIS, TENTRAM DAN DAMAI, SERTA SEJAHTERA LAHIR DAN BATHIN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 “

Visi tersebut merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membawa arah masa depan bangsa yang bersatu, demokratis, dinamis, tentram, damai serta sejahtera lahir dan bathin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2.1.2 Pernyataan Misi

Untuk memenuhi visi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim menjabarkannya ke dalam 3 (tiga) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan iklim kehidupan kebangsaan yang dinamis, tentram, rukun dan damai yang ditopang oleh makin mantapnya wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, ketahanan bangsa, falsafah kehidupan bangsa serta kemampuan bela negara segenap warga negara.
2. Mewujudkan integrasi sosial budaya bangsa melalui penguatan peran institusi-institusi sosial dan budaya yang tambah dan berkembang dalam masyarakat, serta ditopang oleh perilaku sosial masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa.
3. Mewujudkan situasi dan kondisi tentram serta perilaku integratif dalam masyarakat yang kondusif bagi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah.

2.2 Tujuan dan Sasaran

2.2.1 Tujuan

Penjabaran dari visi, misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim dirumuskan melalui beberapa target yang tertuang dalam tujuan dari Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim, sebagai berikut :

1. Mewujudkan situasi dan kondisi kabupaten Muara Enim yang aman, tentram dan rukun.
2. Meningkatkan kualitas aparatur

2.2.2 Sasaran

Sasaran dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 - 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan 1

Mewujudkan situasi dan kondisi kabupaten Muara Enim yang aman, tentram dan rukun

Sasaran	Program
- Mewujudkan Situasi dan Kondisi Kabupaten Muara Enim yang Aman, Tentram dan Rukun	- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan

	<p>melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
--	---

Tujuan 2

Meningkatnya kualitas aparatur

Sasaran	Program
- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan/Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.3 **Rencana Kinerja (RENJA)**

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023, disusun suatu Rencana Kinerja setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dalam Rencana Kinerja (Renja)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2023 diuraikan sasaran-sasaran yang dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023. Adapun Rencana Kinerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya rasa aman, demokratis dan partisipatif masyarakat kabupaten Muara Enim.	Zero Konflik SARA dan POLEKSOSBUD	0

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Meningkatnya rasa aman, demokratis dan partisipatif masyarakat kabupaten Muara Enim.	Zero Konflik SARA dan Poleksosbud	0	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.090.800.400,-
			1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	2.090.800.400,-
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	41.974.443.697,-
			1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah	41.974.443.697,-
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	688.950.800,-
			1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	688.950.800,-

			<p>Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.</p> <p>Program Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</p> <p>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</p>	<p>770.483.00,-</p> <p>770.483.000,-</p>
			<p>Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial</p> <p>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</p>	<p>3.823.447.000,-</p> <p>3.823.447.000,-</p>

Jumlah Anggaran : Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 49.348.124.897,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja (LKJ) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2023.

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim.

Rincian analisa masing-masing capaian sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya rasa aman, demokratis dan partisipatif masyarakat Kabupaten Muara Enim.	Zero konflik SARA dan Poleksosbud	0	0	100%

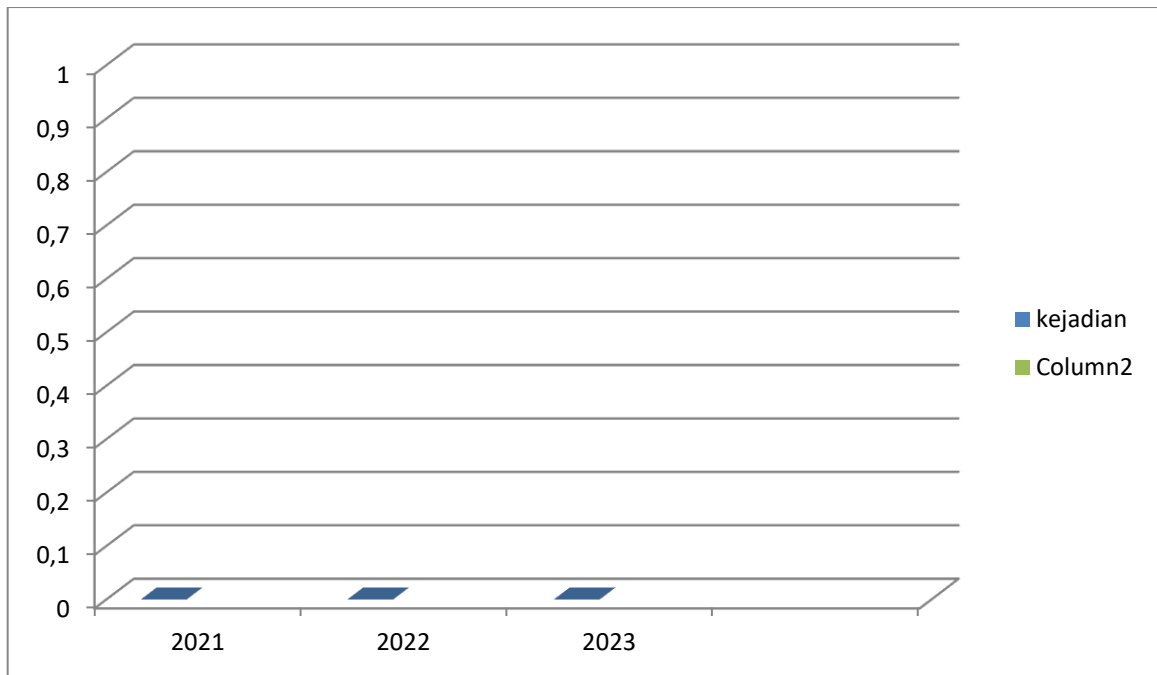
Secara umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim telah dapat melaksanakan tupoksi utama yang menjadi tanggung jawab organisasi, selain itu juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. Dari sasaran yang telah ditetapkan telah dilaksanakan semuanya, namun tingkat keberhasilannya masih perlu ditingkatkan.

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

- Meningkatkan rasa aman, demokratis dan partisipatif masyarakat kabupaten Muara Enim

Indikator keberhasilan sasaran yaitu zero konflik SARA dan Poleksosbud yang ada di Kabupaten Muara Enim, berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Tahun	2021	2022	2023
Kejadian	0	0	0



Adapun jumlah konflik SARA dan poleksosbud yang terjadi di tahun 2023 tidak ada (zero konflik). Dengan demikian di tahun 2023 target capaian kinerja tercapai dengan realisasi kinerja sebesar 100%.

B. PERBANDINGAN REALISASI 2023 DENGAN TARGET KINERJA LIMA TAHUN

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 dengan target kinerja lima tahun yang terdapat di dalam Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA
SAMPAI DENGAN 2023 DENGAN TARGET KINERJA 5 TAHUN**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Muara Enim
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				
			Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	Meningkatnya rasa aman, demokratis dan partisipatif masyarakat Kabupaten Muara Enim.	Zero konflik SARA dan Poleksosbud	0 konflik	0 konflik	0 konflik	0 konflik	0 konflik	0 konflik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim, dalam mencapai sasaran meningkatnya rasa aman, demokratis dan partisipatif masyarakat kabupaten Muara Enim dengan indikator zero konflik SARA dan poleksosbud telah melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dini terhadap konflik, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama. Adapun sosialisasi tersebut dilaksanakan di 3 (Tiga) kecamatan lingkup kabupaten Muara Enim. Dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Untuk kegiatan sosialisasi forum pembauran kebangsaan di tahun 2023 pesertanya melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat. Adapun tujuan dilaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan di tingkat umum yaitu guna meningkatkan dan mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, Undang Undang Dasar Negeri 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

**C. AKUNTABILITAS KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023**

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5		
Meningkatnya rasa aman, demokratis dan partisipatif masyarakat Kabupaten Muara Enim.	Zero konflik SARA dan poleksosbud		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.615.004.698,-	4.054.580.213,-	87,86%
			1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.007.700,-	118.669.339,-	95,70%
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.270.534.034,-	2.785.562.113,-	85,17%
			3. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	10.560.000,-	6.230.000,-	59,00%
			4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.992.000,-	55.405.350,-	86,58%
			5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	649.552.680,-	631.091.536,-	97,16%
			6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	141.770.020,-	138.680.000,-	97,82%
			7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.400.000,-	157.392.181,-	82,66%
			8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.188.264,-	161.549.694,-	98,39%
						Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.090.800.400,-	1.813.590.568,-	86,74%

			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	41.974.443.697,-	41.920.441.398,-	99,87%
			1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah	41.974.443.697,-	41.920.441.398,-	99,87%
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	688.950.800,-	665.656.033,-	96,62%
			1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	688.950.800,-	665.656.033,-	96,62%
			Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	770.483.000,-	742.071.976,-	96,31%
			1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	728.156.500,-	742.071.976,-	96,31%
			Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kualitas	3.823.447.000,-	3.795.600.304,-	99,27%

			dan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial			
			1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.823.447.000,-	3.795.600.304,-	99,27%

Jumlah Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 sebesar Rp. 53.963.129.595,- (Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 52.991.940.492,- (Lima Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau 98,20%.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menggambarkan semua pencapaian kinerja, dapat dilihat dari tabel pengukuran kinerja berikut ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya rasa aman, demokratis dan partisipatif masyarakat Kabupaten Muara Enim.	Zero konflik SARA dan poleksosbud	0	0 kejadian	100 %

Jumlah Anggaran :

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 53.963.129.595,-

Jumlah Realisasi :

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 52.991.940.492,-

Langkah-langkah kedepan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai 3 (Tiga) sasaran strategi dengan baik adalah dengan cara :

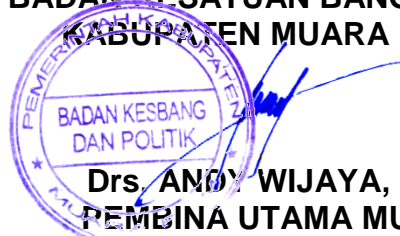
- Lebih mengintensifkan sosialisasi dan pelatihan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal sehingga meningkatnya kualitas SDM aparatur dapat menunjang pelaksanaan program/kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .
- Lebih mengintensifkan sosialisasi mengenai pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.
- Dapat memfasilitasi dan menjalin hubungan baik dengan forum-forum yang ada di kabupaten Muara Enim seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) guna pencegahan dini terhadap konflik yang berkembang di kabupaten Muara Enim baik konflik sara maupun konflik sosial.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023 dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi program/kegiatan mencapai 98,20%. Adapun solusi untuk tahun anggaran 2024, anggaran yang berlebih dan tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan akan dievaluasi pada anggaran tahun 2024.

Demikian Laporan Kinerja (LKJ) lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim.

MUARA ENIM, JANUARI 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUARA ENIM**



**Drs. ANDY WIJAYA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196609251986081001**